

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri dalam suatu Negara (Husband and Purnendu, 1999; Mahemba 2003; Tambunan, 2005) yang dikutip oleh Arief Rahmana (2008). Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kedudukannya saat ini dalam dunia usaha. Wulan dan Nindita (2009) membagi kedudukan UMKM sebagai berikut :

1. Kedudukan UMKM sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
2. Penyedia lapangan kerja terbesar
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan inovasi
5. Untuk UMKM yang telah go internasional, dapat memberikan sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor

Perkembangan sektor UMKM berkembang dengan pesat diperlihatkan dari adanya potensi besar terhadap Produk Domestik Bruto yang pada tahun 2008 mencapai nilai Rp 1.1013,5 triliun (56,7% dari PDB), dengan jumlah unit usaha UMKM mencapai 42,4 juta, dimana jumlah tenaga kerja yang tercatat dalam sekt

ini tercatat sebanyak 79,0 juta pekerja. Pertumbuhan PDB UMKM 2005-2005 ternyata lebih tinggi dari total PDB (Purnomo Setyawan, 2009). Namun pada sisi lain, UMKM dihadapkan pada masalah pengembangan pengelolaan keuangan dikarenakan kurangnya pemahaman akuntansi yang baik oleh pelaku bisnis UMKM. Dalam hal ini, pemerintah telah mencoba mengatasi kendala ini dengan melakukan pembinaan maupun pemberian kredit lunak, juga penyertaan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Sementara itu, hamper semua UMKM tidak mempunyai laporan kinerja usaha dan keuangan untuk melakukan proses kredit, hal ini timbul dikarenakan sebuah UMKM tidak terbiasa untuk melakukan pencatatan maupun penyusunan laporan keuangan mereka sebagai gambaran seluruh kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaannya.

Kebanyakan UMKM hanya mencatat jumlah penerimaan dan pengeluaran, hutang dan piutang, barang yang dibeli dan dijual oleh perusahaan. Namun, pencatatan yang dilakukan terkadang hanya sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi dan tidak sesuai dengan format yang diinginkan oleh perbankan. Meskipun pada akhirnya mereka dapat mengetahui total modal akhir di setiap tahunnya yang memiliki jumlah hamper sama ketika kita mencatatnya dengan sistem akuntansi (H. Jati, Beatus B., Otniel N., 2004). Padahal di lain sisi, laporan keuangan sangat berguna bagi pelaku usaha dalam memperhitungkan semua pendapatan yang diperoleh, tambahan modal yang diinginkan, dan juga kewajiban-kewajiban serta hak yang masih harus dipenuhi.

Penyajian informasi secara transparan, akurat dan reliabel perlu dilakukan mengingat akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa adanya transparansi, akurasi dan reliabilitas informasi. Menurut perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, akuntabilitas probitas dan legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas performa, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Berdasarkan perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*),
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja,
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan,
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu,
5. Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur.

Akuntansi keuangan pada sektor UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini & Suhairi, 2006).Kelemahan ini disebabkan kurangnya pemahan Standar Akuntansi dari pemilik dan rendahnya teknologi informasi yang dimiliki.Standar akuntansi keuangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten.Di samping itu, tersedianya informasi akuntansi yang lebih akurat tidak

memiliki pengaruh pada keputusan atas masalah yang dihadapi oleh pihak manajemen.

Studi penelitian penerapan SAK membuktikan bahwa Standar Akuntansi yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan memberatkan bagi UMKM (Wahdini & Suhairi, 2006). Hal ini menjadi pendorong bagi Ikatan Akuntan Indonesia meluncurkan standar akuntansi ETAP (SAK-ETAP), sebagai dasar pengembangan standar akuntansi khususnya bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan SAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Melalui berbagai hal yang telah dijelaskan juga riset yang telah ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pemahaman SAK-ETAP pada usaha kecil dan menengah. Berdasarkan urai tersebut, maka penelitian ini mengambil topik **“ANALISIS PEMAHAMAN PELAKU USAHA TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (STUDI PADA UMKM PERORANGAN DI SURABAYA)”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk pemahaman pelaku usaha terhadap standar keuangan akuntansi entitas tanpa akuntabilitas

publik berdasarkan skala usaha, jenis usaha, sdm, teknologi?”

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( Studi pada UMKM perorangan di kota Surabaya ).

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi
  - a. Memperkaya wawasan mahasiswa terkait isu akuntansi terutama mengenai standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAKETAP)
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama.
2. Bagi UMKM Perorangan
  - a. Memberikan bermanfaat bagi narasumber sebagai pengetahuan untuk mampu memahami dan menerapkan SAK-ETAP.

### **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan didalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bagian, yang dimana meliputi:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan

dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian. Selain itu juga menyajikan kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan hal-hal mengenai rancangan dan batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

## BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.